

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa menjadi salah satu modal dasar dalam suatu pembangunan, sehingga harus mendapatkan perhatian yang besar. Terlebih lagi dalam peningkatan kemampuan serta keikutsertaan untuk menentukan arah dan kebijakan dalam pembangunan desa. Kemajuan sebuah desa dapat dilihat dari lingkungan sosial yang tertib dan aman. Selain itu juga kondisi ekonomi yang dapat berjalan dengan baik. Serta didukung dengan masyarakat yang dapat mengelola sumber daya alam dengan maksimal.

Desa Pasirharjo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Desa ini dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu sejumlah perangkat desa. Desa ini memiliki ikatan kekeluargaan serta kesadaran gotong royong yang kuat. Masyarakatnya memiliki toleransi yang tinggi di berbagai kegiatan maupun ibadah, karena mayoritas masyarakat Desa Pasirharjo utara memeluk agama hindu dan mayoritas masyarakat Desa Pasirharjo selatan memeluk agama islam. Desa ini memiliki lokasi yang strategis, sehingga mudah dijangkau serta dapat menunjang pengembangan potensi.

Kondisi lingkungan di Desa ini sudah memadai, yang mana fasilitas umum seperti jalan sudah cukup baik. Karena lokasinya yang strategis, yang mana dilintasi salah satu jalur utama atau jalur provinsi yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan kota-kota lain

disekitarnya. Wilayah Desa Pasirharjo merupakan tanah dataran dan sebagian besar berupa tanah berpasir. Menurut klasifikasinya desa ini merupakan desa yang subur. Sehingga cocok untuk bercocok tanam.

Dalam menciptakan tatanan ekonomi yang baik di suatu desa maka diperlukan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa. Melalui pengelolaan sumber daya alam yang baik, maka dapat mendorong kemajuan dari desa tersebut. Hal ini membuat desa memiliki posisi yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelancaran perekonomian dapat diciptakan melalui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini berguna untuk memandirikan masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu gerakan yang dapat menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Sehingga diperlukan beberapa program serta kegiatan yang memiliki cara kerja efisien dan efektif untuk memobilisasi potensi dan mengurangi dispotensi dalam masyarakat. Implementasi dari pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan manajemen, program, dan pembiayaan. Sehingga masyarakat menjadi pemilik kewenangan sekaligus pemeran yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator serta regulator².

² Bernardus Seran Kehika, "Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara)", Jurnal Agribisnis Lahan Kering, Vol. 3, No. 1, 2018, Hal. 4

Dalam pemberdayaan, semua unsur desa berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama dan saling mengisi. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur dapat meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan tugasnya masing-masing. Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan tugas sebagai fasilitator untuk memudahkan unsur-unsur yang lain dalam memberdayakan dirinya sendiri. Untuk melaksanakan tugasnya dalam pemberdayaan masyarakat desa, para pekerja atau fasilitator harus profesional, memiliki kemampuan dan keterampilan terkait.

Desa Pasirharjo menjadi salah satu desa yang dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan sesuai program yang dibuat. Data ini dipaparkan oleh perangkat desa pasirharjo, berikut terdapat beberapa kegiatan pemberdayaan di tahun 2017 sampai 2021.

Tabel 1.1
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasirharjo Kecamatan
Talun Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Kegiatan Pemberdayaan
1.	2017	Sosialisasi ke PKK dan Karang taruna
2.	2018	Peningkatan ekonomi produktif pelatihan pembuatan paving
3.	2019	Peningkatan kapasitas perangkat desa dan peningkatan kapasitas kelompok ternak
4.	2020	Pembangunan kios BUMDES
5.	2021	Bimtek teknologi tepat guna untuk pertanian

Sumber : APBD Desa Pasirharo tahun 2017-2021

Tabel 1.1 menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pasirharjo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021). Kegiatan ini dilaksanakan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sehingga angka kemiskinan menjadi menurun. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menaikkan hasil produksinya dapat melalui beberapa kegiatan berupa pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan lain yang dapat menaikkan kualitas sumber daya manusianya. Kegiatan yang terus berjalan dan berkembang dengan baik yaitu pada BUMDES. Pembangunan kios serta angkringan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa dan membuat desa menjadi semakin maju.

Kegiatan pemberdayaan di Desa Pasirharjo dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Mulai dari perencanaan, pengkajian, perencanaan program yang akan dilaksanakan, implementasi kegiatan pemberdayaan, dan evaluasi. Hal ini dilakukan secara bersama oleh pemerintah desa bersama kelompok masyarakat. Kegiatan yang terlaksanadiharapkan memberi pengaruh dalam jangka panjang, sehingga kegiatan pemberdayaan diberi pengawasan dan dilakukan secara berkelanjutan. Pemberdayaan di Desa Pasirharjo ditujukan untuk meningkatkan perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja barau, pembekalan *skill* masyarakat, dan meminimumkan pengeluaran masyarakat.

Proses memandirikan masyarakat melalui pemberdayaan harus disesuaikan dengan potensi serta sumber daya yang mendukung. Pada tahun ini kegiatan pemberdayaan dilaksanakan dengan dua tahap. Pertama dengan melakukan sosialisasi penggunaan teknologi untuk pertanian yang diikuti oleh para petani desa dan dilaksanakan di balai desa Pasirharjo. Selanjutnya yaitu bimtek tepat guna untuk pertanian. Kegiatan ini berupa pelatihan pembuatan pupuk organik, yang dilaksanakan di balai Desa Pasirharjo yang diikuti oleh para petani desa. Tujuannya yaitu agar para petani dapat memanfaatkan teknologi dalam bercocok tanam, sehingga dapat meningkatkan hasil *output*. Selain itu untuk penggunaan pupuk organik dapat memperkecil angka pengeluaran serta membuat ramah lingkungan.

Program dari pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan asistensi, fasilitasi, dan promosi belum diterapkan dengan baik. Asistensi merupakan kegiatan berupa pelatihan, konsultasi atau asistensi teknis, dan sejenisnya, yang diberikan secara merata tanpa mengelompokkan kemampuan masyarakat yang dibina atau tidak adanya diskriminasi. Untuk fasilitasi yaitu dengan memberikan alat atau fasilitas untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi lebih produktif. Sedangkan promotion berupa bantuan pada bidang-bidang tertentu yang sangat dibutuhkan, hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi³.

³ Rusni Djafar dan Umar Sune, *Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pohuwato*, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 11, No. 3, 2019, Hal. 250

Pelaksanaan pemberdayaan bermaksud untuk menciptakan suasana serta iklim yang dapat memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Sehingga setiap individu dan masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk menciptakan kemandirian. Selain itu juga untuk memperkuat potensi serta daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan langkah yang nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana yang baik fisik maupun sosial yang juga dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Ketersediaan akses dapat berupa adanya lembaga pendanaan, pelatihan dan pengembangan usaha ekonomi serta pemasaran bagi masyarakat desa, sehingga memberikan peluang masyarakat semakin berdaya⁴.

Memberdayakan rakyat berarti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Karena hal ini juga dapat meminimalisir terjadinya diskriminasi serta persaingan yang tidak imbang dan eksploitasi terhadap yang lemah. Sehingga perlindungan pemihakan pada masyarakat lemah bersifat sangat mendasar dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak imbang dan eksploitasi terhadap yang lemah.

Setelah terlaksananya program pemberdayaan masyarakat, kegiatan terus dilakukan seperti yang telah direncanakan. Kondisi masyarakat setelah pemberdayaan di bidang UMKM, perdagangan dan

⁴ Mahendra Wijaya, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Journal of Rural and Development, Vol. 1, No. 1, (2010), Hal. 3

perindustrian tetap berjalan dengan lancar yang didukung dengan adanya ruko dan angkringan. Hal ini dapat membuat masyarakat yang memiliki usaha tetap dapat berkembang karena jangkauan konsumen yang lebih banyak. Untuk masyarakat yang memiliki usaha makanan kecil dapat menjualnya di angkringan desa, yang mana buka setiap sore sampai malam. Dan untuk menarik konsumen luar datang, maka diadakanya orkes di angkringan desa yang juga dekat ruko. Dan untuk industri rumahan masyarakat disediakan lapak pada aplikasi simpeldesa.

Untuk kondisi pemberdayaan perempuan, pertanian dan peternakan terus dilakukanya kemajuan dengan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan hingga sekarang. Informasi yang diperoleh dari pemerintah Desa Pasirharjo, pada tahun 2021 telah tercatat terdapat pelatihan untuk PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yaitu pelatihan pembuatan buket, pelatihan kue, pelatihan pengembangan industri (ayam geprek) guna peningkatan kapasitas perempuan. Kelompok tani wanita (KTW) juga telah mendapatkan sertifikat pengesahan kelompok tani. Kegiatan pemberdayaan untuk tani tidak hanya difokuskan pada bapak-bapak, melainkan juga untuk ibu-ibu.

Dengan terlaksananya pemberdayaan masyarakat dapat membuat banyak perubahan yang bersifat kemajuan. Petani desa dapat memanfaatkan teknologi serta menciptakan alternatif pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Para ibu rumah tangga diberi pembekalan berupa pelatihan dan wawasan agar lebih produktif. Dengan terlaksananya

pemberdayaan, maka terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatnya keahlian masyarakat pada bidangnya. Kondisi perekonomian lebih tertata dengan pemanfaatan potensi yang tersedia. Kondisi sosial menjadi lebih baik dengan perekonomian yang maju dapat mendorong kemajuan infrastruktur di Desa Pasirharjo. Selain itu juga dapat membuat desa menjadi contoh untuk desa lain dalam melakukan pembangunan.

Masyarakat desa yang mandiri serta memiliki penghasilan yang memadai dapat membantu proses pembangunan ekonomi. Umumnya masyarakat desa hanya bergantung pada sumber daya alam yang tersedia saja, tanpa berfikir untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas taraf hidup. Pemerintah Desa Pasirharjo bersama para kelompok masyarakat bekerja sama dalam membangun perekonomian desa. Karena penerapan pemberdayaan desa yang berhasil menciptakan desa yang mandiri akan mendorong desa lain termotivasi. Sehingga akan berdampak pada kemajuan serta kesejahteraan wilayah kabupaten atau bahkan provinsi tersebut.

Pembangunan desa menjadi bagian yang sangat penting serta strategis untuk mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Karena peran pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Jika kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dapat terlaksana, maka tatanan ekonomi suatu Negara dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah memiliki peranan peranan dasar serta peranan strategis. Sehingga dalam proses terciptanya

pembangunan ekonomi, maka diharapkan agar pemerintah dapat menggerakkan partisipasi masyarakat, dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang menurut kemampuannya sendiri.

Di Indonesia, pembangunan ekonomi tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan dan harapan, akan tetapi terdapat beberapa hambatan atau masalah yang dialami. Masalah yang sering ditemui yaitu tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Negara berkembang salah satunya seperti Indonesia sering mengalami ketergantungan pada sektor pertanian primer, rendahnya produktivitas, adanya pasar dan informasi yang tidak sempurna, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat kehidupan, dll. Sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pendapatan masyarakat serta mendorong tingkat kemiskinan di suatu Negara. Angka kemiskinan pada suatu Negara yang tinggi dapat menghambat suatu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan pendapatan penduduk dalam jangka panjang yang menyebabkan perubahan teknologi, pola pikir masyarakat serta kelembagaan⁵.

Proses pembangunan dapat berupa suatu perubahan sosial budaya serta tatanan ekonomi. Suatu pembangunan akan menjadi sebuah proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung maka pada masyarakat dan struktur sosialnya. Karena penggerak dari suatu perubahan dalam pembangunan adalah sumber daya manusia serta kondisi sosialnya.

⁵ Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), Hal. 3

Sehingga pembangunan akan tergantung dari suatu proses emansipasi diri. Perubahan pada masyarakat yang bersifat menyeluruh tersebut, bisa dikembangkan oleh pemerintah, yang dapat pula mewakili kekuatan-kekuatan pembaharuan di dalam masyarakat⁶.

Suatu pembangunan dalam perekonomian selalu ditandai dengan adanya kemajuan atau perbaikan. Kemajuan suatu wilayah dapat dilihat dari segi infrastruktur yang memadai dan memungkinkan untuk menjangkau daerah pelosok. Selain itu juga banyaknya penginputan tenaga kerja yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu wilayah yang memiliki sistem perekonomian yang baik di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah terluas dibandingkan dengan enam provinsi di Pulau Jawa. Serta memiliki jumlah penduduk terbanyak ke dua di Indonesia. Meskipun memiliki jumlah penduduk yang banyak, tetapi Jawa Timur dapat menekankan angka pertumbuhan penduduk miskinnya. Karena Jawa Timur terkenal dengan pusat industri serta memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi. Tingkat perumbuhan penduduk miskin di Jawa Timur juga selalu ditekankan. Berikut data mengenai presentase penduduk miskin Jawa Timur pada lima tahun terakhir.

⁶ Rusni Djafar dan Umar Sune, *Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pohuwato*, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 11, No. 3, 2019, Hal. 252

Tabel 1.2
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur
Menurut Kabupaten/Kota, 2017 - 2021

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten					
Pacitan	15,42	14,19	13,67	14,54	15,11
Ponorogo	11,39	10,36	9,64	9,95	10,26
Trenggalek	12,96	12,02	10,98	11,62	12,14
Tulungagung	8,04	7,27	6,74	7,33	7,51
Blitar	9,80	9,72	8,94	9,33	9,65
Kediri	12,25	11,31	10,42	11,4	11,64
Malang	11,04	10,37	9,47	10,15	10,5
Lumajang	10,87	9,98	9,49	9,83	10,05
Jember	11,00	9,98	9,25	10,09	10,41
Banyuwangi	8,64	7,80	7,52	8,06	8,07
Bondowoso	14,54	14,39	13,33	14,17	14,73
Situbondo	13,05	11,82	11,2	12,22	12,63
Probolinggo	20,52	18,71	17,76	18,61	18,91
Pasuruan	10,34	9,45	8,68	9,26	9,7
Sidoarjo	6,23	5,69	5,32	5,59	5,93
Mojokerto	10,19	10,08	9,75	10,57	10,62
Jombang	10,48	9,56	9,22	9,94	10
Nganjuk	11,98	12,11	11,24	11,62	11,85
Madiun	12,28	11,42	10,54	11,46	11,91
Magetan	10,48	10,31	9,61	10,35	10,66
Ngawi	14,91	14,83	14,39	15,44	15,57
Bojonegoro	14,34	13,16	12,38	12,87	13,27
Tuban	16,87	15,31	14,58	15,91	16,31
Lamongan	14,42	13,80	13,21	13,85	13,86
Gresik	12,80	11,89	11,35	12,4	12,42
Bangkalan	21,32	19,59	18,9	20,56	21,57
Sampang	23,56	21,21	20,71	22,78	23,76
Pamekasan	16,00	14,47	13,95	14,6	15,3
Sumenep	19,62	20,16	19,48	20,18	20,51
Kota					
Kediri	8,49	7,68	7,16	7,69	7,75
Blitar	8,03	7,44	7,13	7,78	7,89
Malang	4,17	4,10	4,07	4,44	4,62
Probolinggo	7,84	7,20	6,91	7,43	7,44

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pasuruan	7,53	6,77	6.46	6.66	6.88
Mojokerto	5,73	5,50	5.15	6.24	6.39
Madiun	4,94	4,49	4.35	4.98	5.09
Surabaya	5,39	4,88	4.51	5.02	5.23
Batu	4,31	3,89	3.81	3.89	4.09
Jawa Timur	11,77	10,98	10.37	11.09	11.4

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, BPS Provinsi Jawa Timur

Table 1.2 menunjukkan presentase dari jumlah penduduk miskin di setiap kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Untuk kabupaten blitar khususnya memiliki penduduk miskin yang terbilang cukup sedikit jika di bandingkan dengan kota lainnya. Mulai tahun 2017 hingga 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar mengalami penurunan. Penurunan yang drastis penduduk miskin Kabupaten Blitar terlihat di tahun 2019 yaitu dari 9,72% menjadi 8,94%. Kemudian mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2020 menjadi 9,33%. Dan masih terus meningkat di tahun 2021 menjadi 9,65%.

Jawa timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki perekonomian yang baik. Yang mana banyaknya pendirian industri besar, menengah dan kecil dapat menciptakan lapangan kerja serta menambah penghasilan. Hal ini dapat menekankan jumlah pertumbuhan penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin masyarakat Jawa Timur mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi di tahun 2017 yaitu sebesar

11,77%. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah terjadi di tahun 2019 yaitu dari 10,98% menjadi 10,37%.

Angka kemiskinan di Kabupaten Blitar terbilang sedang, hal ini didukung oleh kegiatan yang bersifat membangun untuk masyarakat., Pembangunan dari desa melalui pemberdayaan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam penurunan jumlah kemiskinan. Dan untuk kenaikan angka kemiskinan di tahun 2020 dan 2021 dipicu oleh pandemic covid-19 yang berdampak pada kebijakan pemerintah terhadap pembatasan sosial. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengalami kekurangan pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Blitar bersama masyarakat lebih menekankan kerja sama dalam menciptakan ekonomi yang stabil. Hal ini dapat menjadi gambaran untuk daerah lain dalam meminimumkan angka kemiskinan.

Suatu daerah yang dapat melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik akan memberikan manfaat yaitu kekayaan dari output masyarakat serta perekonomian akan bertambah. Selain itu juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk masyarakat dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya yang tersedia. Serta semakin besarnya ketersediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga hal ini dapat mengurangi kesenjangan perbedaan antara Negara berkembang dengan Negara maju⁷.

⁷ Muhammad Hasan, dkk., *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), Hal. 23.

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan sebuah Negara. Kemiskinan bukan menjadi permasalahan yang berdiri sendiri, karena hal ini disebabkan karena tidak tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau ketidak merataan distribusi untuk masyarakat. Suatu pembangunan dikatakan berhasil atau gagal diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan. Karena kemiskinan menjadi masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi.

Kondisi kemiskinan ditandai dengan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidup minimum yang dibutuhkan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat, sesuai dengan hak-hak dasar mereka. Kemiskinan merupakan kondisi kelaparan, ketiadaan tempat berlindung, ketidakmampuan berobat saat sakit, tidak memiliki akses ke sekolah, tidak memiliki pekerjaan, khawatir akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidaktersediaan air bersih, ketidakberdayaan, serta tidak ada keterwakilan dan kebebasan. Kemiskinan terjadi bukan hanya dari segi ekonomi seperti modal, melainkan juga tingkat pendidikan kualitas individu, dan faktor lingkungan. Pada umumnya kemiskinan di Indonesia terjadi karena banyak aspek seperti minimnya kesempatan kerja,

upah atau gaji berada dibawah standar minimum, ketidak tersediaan asset, produktivitas rendah, diskriminasi, tekanan harga, penjualan tanah⁸.

Pada dasarnya masalah kemiskinan berawal dari ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan dari segi ekonomi ditandai dengan keterbatasan asset seperti faktor produksi, rendahnya kemampuan mengetahui peluang ekonomi, tawar menawar, dan tingkat upah. Ketidakberdayaan dalam segi politik dikarenakan lemahnya proses pengambilan keputusan, sehingga terjadinya diskriminasi. Dan untuk ketidakberdayaan dari segi social yaitu karena rendahnya pelayanan social, informasi, serta interaksi social yang membuat masyarakat menjadi termarjinalkan. Hal ini membuat beberapa lapisan masyarakat mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya⁹.

Agar kemiskinan di Indonesia dapat dituntaskan maka perlu adanya strategi serta kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui pemberdayaan masarakat desa diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang baik. Desa yang dapat berdaya adalah desa yang dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia dengan baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Potensi yang dimiliki setiap individu dan wilayah harus digali dan dikembangkan. Karena dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya serta dapat mendorong terciptanya Negara yang sejahtera.

⁸ Hendrikus Tri Wibawanto Gedeona, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5, No. 1, 2008, Hal. 9

⁹ Atma Ras, *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*, Socius, Vol. 14, 2013, Hal. 58

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Serta diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Desa Pasirharjo khususnya dan menjadi gambaran untuk daerah lain. Karena penuntasan kemiskinan masih menjadi tugas untuk Negara, maka dengan adanya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di desa diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut maupun Negara. Penulis memilih Desa Pasirharjo karena desa ini memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.

Topik penelitian ini penting karena dapat menambah wawasan mengenai pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat serta dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan pemberdayaan maka diharapkan masyarakat mampu menyesuaikan kondisi dengan perkembangan teknologi. Dan keberhasilan dari pelaksanaan pemberdayaan diharapkan dapat menjadi gambaran untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu juga sebagai cerminan daerah lain yang memiliki potensi sama dengan Desa Pasirharjo untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Mengurangi kemiskinan masih menjadi bahan yang menarik untuk dikaji, jadi topik penelitian ini relevan dan dapat dijadikan sebagai literature ilmiah.

Dari konteks penelitian yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat memahami pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan dari program-program yang dapat mengurangi masalah kemiskinan, dengan hal ini penulis mengambil judul penelitian “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN (Studi Pada Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana hasil dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terhadap pengurangan kemiskinan bagi masyarakat Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis hasil dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terhadap pengurangan kemiskinan bagi masyarakat Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

D. Identifikasi Penelitian dan Pembatasan Penelitian

1. Identifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas mengenai proses pemberdayaan masyarakat Desa Pasirharjo, serta hasil dari pelaksanaan program pemberdayaan untuk mengurangi kemiskinan.

2. Pembatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki pembatasan penelitian agar mendapatkan hasil yang mendalam serta pembahasan penelitian lebih terarah dan fokus. Batasan penelitian yaitu pada penerapan pemberdayaan masyarakat serta hasil dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai kajian ilmu pengetahuan dan sebagai sumber pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi dan khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis: Sebagai sarana untuk berlatih dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai penambah wawasan serta pengetahuan sebagai media pengaplikasian ilmu yang didapat pada buku perkuliahan. Serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan.

- b. Bagi Aparatur Desa: Dapat digunakan sebagai salah satu rujukan pengambilan keputusan serta menentukan apa yang akan diambil dalam pedoman program pemberdayaan masyarakat.
- c. Bagi Mahasiswa: Dapat dijadikan sebagai salah satu informasi untuk menambah wawasan serta gambaran bagi peneliti yang mengadakan penelitian serupa. Selain itu juga sebagai bahan pembending atau literature ilmiah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan kemiskinan.

F. Definisi Istilah

Supaya pembaca mendapatkan pemahaman yang sama mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Pada Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)”, maka penulis perlu memaparkan definisi istilah secara konseptual dan secara operasional sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat pada kondisi yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memampukan dan memandirikan kelompok atau lapisan masyarakat¹⁰.

b. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya yaitu untuk mempertahankan serta mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak dasar masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, minimal untuk hidup yang layak¹¹.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan pemaparan definisi konseptual diatas, maka dapat didefinisikan secara operasional yang dimaksud dari “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Pada Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)” adalah pemaparan suatu kegiatan dan hasil dari pemberdayaan masyarakat untuk

¹⁰ Sri Handini, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), Hal. 13

¹¹ Rabina Yunus dan Mansur Radjab, *Analisis Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus pada Program Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2018), Hal. 3

menciptakan sebuah kemandirian individu sehingga menciptakan kemakmuran dan meningkatkan pendapatan ,masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, sehingga tercapainya tujuan pengentasan kemiskinan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi ditujukan untuk memberikan alur kajian atau pembahasan yang sistematika serta menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami. Berikut sistematika penulisan skripsi yang dilakukan oleh penelit:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, serta Abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini mencangkup tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian supaya lebih terfokuskan, manfaat penelitian, penegasan istilah yang terdiri dari definisi konseptual dan definisi operasional, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mencakup teori pemberdayaan masyarakat dan teori kemiskinan. Selain itu juga membahas beberapa acuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini mencakup tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang pemaparan data dan temuan penelitian

BAB V : Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil analisis melalui pendekatan yang sistematis antara temuan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB VI : Penutup

Bab ini mencakup tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, serta Daftar Riwayat Hidup.